

Analisis Media Komunikasi Politik Studi Kasus Operasi Tangkap Tangan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

Maya Fitriani¹, Nur Laila Audyna², Muhammad Fiqriyanor³, Muzahid Akbar Hayat⁴, Istiana Yuliarny⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

¹mfitriani912@gmail.com, ²momoiaudy@gmail.com, ³fiqriyanor123@gmail.com,

⁴m.akbarhayat@gmail.com, ⁵iyuliarny@gmail.com

ABSTRACT; *The study analyzed the media's role in political communications related to hand-caught operations involving the governor of southern Kalimantan provinces, It reflects a major challenge in the eradication of hand-to-hand operations in Indonesia..With descriptive qualitative approach, The research explored how the media presented the news and its impact on public perception..The results show that the media has a significant influence in forming public opinion, where national media frames ottt as a systemic problem, While local media is focused more on direct impacts on the public. Spiral phenomenon of silence is also identified, where individuals feel pressured to voice different views of the media, limiting freedom of expression and public participation.This study stressed the importance of objective and balanced preaching to promote transparency and accountability in government.The recommendation is given to the media to pay attention to the effects of the framing news and involve various perspectives in reporting, In order to increase public trust in government institutions.*

Keywords: *Political Communication, Media, Operation Catch Hand, South Kalimantan, The Public Perception.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis peran media dalam komunikasi politik terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, mencerminkan tantangan besar dalam pemberantasan Operasi Tangkap Tangan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana media menyajikan berita dan dampaknya terhadap persepsi publik. Hasil menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik, di mana media nasional membingkai OTT sebagai masalah sistemik, sementara media lokal lebih fokus pada dampak langsung bagi masyarakat. Fenomena spiral of silence juga teridentifikasi, di mana individu merasa tertekan untuk menyuarakan pandangan yang berbeda dari media, membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberitaan yang objektif dan berimbang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Rekomendasi diberikan kepada media untuk memperhatikan dampak framing berita dan melibatkan berbagai perspektif dalam pelaporan, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Media, Operasi Tangkap Tangan, Kalimantan Selatan, Persepsi Publik.

PENDAHULUAN

Kegiatan politik di Indonesia sering kali diwarnai oleh kasus OTT, yang menjadi perhatian utama masyarakat. OTT adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu contoh yang mencolok adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, yang mengungkapkan praktik OTT di tingkat tertinggi pemerintahan daerah.

Kasus OTT ini menarik perhatian publik dan media, menciptakan gelombang diskusi mengenai akuntabilitas pejabat publik. Dalam konteks ini, media berperan sebagai jembatan informasi, menyampaikan fakta dan perkembangan terkini kepada masyarakat. Namun, cara media mengkonstruksi berita tentang kasus ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap persepsi publik. Media dapat membentuk narasi yang berfokus pada aspek hukum, moral, atau politik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi sikap dan respons masyarakat.

Di era digital, di mana informasi cepat tersebar melalui berbagai platform, penting untuk memahami bagaimana pemberitaan media membentuk pemahaman dan reaksi masyarakat terhadap isu-isu OTT. Pemberitaan yang bias atau sensationalist dapat menciptakan stigma yang merugikan, sementara pemberitaan yang objektif dan informatif dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam mendorong transparansi.

Selain itu, kasus ini juga memiliki dampak lebih luas, termasuk potensi pengaruh terhadap proses politik, pemilihan umum mendatang, dan reformasi dalam kebijakan OTT. Oleh karena itu, analisis media komunikasi politik dalam konteks operasi tangkap tangan Gubernur Kalimantan Selatan sangat penting untuk mengungkap dinamika

komunikasi yang terjadi, serta untuk memberikan rekomendasi bagi praktik jurnalistik yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk mendalami fenomena sosial, termasuk dalam bidang pendidikan, manajemen, administrasi bisnis, kebijakan publik, pembangunan, dan hukum (Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si. dan Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M.PD., 2014: 67-68). Metode ini dirancang untuk penelitian yang bersifat observasional dan fokus pada kasus tertentu. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan cara yang mendalam dan tidak menggunakan prosedur statistik atau perhitungan numerik lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan makna dari interaksi perilaku manusia dalam konteks tertentu, berdasarkan perspektif peneliti. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami (natural setting).

Metode kualitatif lebih menekankan pada pendekatan fenomenologis yang mengutamakan pemahaman mendalam (verstehen). Penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara komprehensif, meningkatkan sensitivitas terhadap masalah yang ada, menjelaskan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory), serta memperluas pemahaman tentang satu atau lebih fenomena yang dihadapi. Istilah lain yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi: postpositivistik, etnografi, fenomenologi, subjektif, studi kasus, kerja lapangan, data kualitatif, interaksi simbolik, perspektif internal, etnomethodologi, deskriptif, observasi partisipatif, Chicago school, sejarah hidup, ekologis, kualitatif, humanistik, dan perspektif emik (yang menekankan pada pandangan informan).

Dalam metode kualitatif, informan dipilih secara bertujuan (purposive) dan dapat berkembang melalui teknik snowball hingga data yang dikumpulkan dianggap memadai atau mencapai titik jenuh (redundancy). Data yang diperoleh umumnya bersifat kualitatif. Alih-alih mencari generalisasi, metode penelitian ini lebih memilih analisis mendalam (in-depth analysis) dengan mengkaji masalah secara individual, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa setiap masalah memiliki karakteristik yang berbeda.

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif bukanlah untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memahami suatu masalah secara mendalam. Penelitian

kualitatif berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih dalam. Pendekatan penelitian merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan rumusan masalah dan variabel penelitian, penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Agenda Setting dalam Pelaporan Media tentang OTT Gubernur Kalimantan Selatan

Analisis tentang agenda setting membuka mata kita pada pengaruh media terhadap opini publik dan keputusan politik di Kalimantan. Media nasional menjangkau luas, terutama saat transisi politik. Berita lokal mengangkat isu sosial dan ekonomi demi kepentingan masyarakat. Media bukan sekadar penyampai informasi. Mereka adalah jendela yang menunjukkan isu-isu krusial yang mempengaruhi kehidupan kita. Dengan semakin banyak outlet media, pandangan publik terhadap isu politik dan sosial menjadi semakin penting.

Media memiliki kekuatan luar biasa, mampu menarik perhatian kita pada isu tertentu. Misalnya, dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), ketika media menyoroti OTT sebagai masalah sistemik, pandangan publik pun beralih ke perlunya perbaikan yang mendalam. Sebaliknya, jika media fokus pada tindakan individu, masalah OTT terlihat seolah hanya persoalan pribadi. Jadi, analisis agenda setting ini mengajarkan kita bagaimana media massa membentuk cara kita memandang isu OTT dan integritas politik.

Pemberitaan pertama kali muncul pada tanggal 6 Oktober 2024 pukul 21.13 WIB oleh KumparanNEWS dengan judul "Pemberitaan KPK Gelar OTT di Kalsel."



KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). OTT ini terkait dugaan suap yang melibatkan penyelenggara negara. “Benar, kejelasannya tunggu lebih lanjut kami masih sedang memeriksa, setelah selesai akan kami update,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Minggu (6/10). KPK belum merinci OTT tersebut. Termasuk siapa saja yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK juga belum merinci konstruksi perkara dalam operasi senyap itu. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan, apakah naik menjadi tersangka atau tidak.

Tanggal 8 Oktober 2024 pukul 06.26 WIB, CNN menerbitkan pemberitaan dengan Judul : Fakta-fakta OTT KPK di Kalsel: Tangkap 6 Orang, Sita Rp10 Miliar.

Fakta-fakta OTT KPK di Kalsel: Tangkap 6 Orang, Sita Rp10 Miliar

CNN Indonesia

Selasa, 08 Okt 2024 06:26 WIB



Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setelah absen lebih dari delapan bulan. Kali ini, KPK menyasar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah fakta terkait dengan operasi senyap tersebut.

1. Tangkap 6 orang

KPK mengumumkan sedang melakukan OTT di Pemprov Kalsel pada Minggu (6/10) malam. Sebanyak enam orang ditangkap. Mereka terdiri dari empat orang penyelenggara negara dan dua orang pihak swasta. "Tentunya akan dilakukan

proses permintaan keterangan kepada yang bersangkutan. Berikutnya akan kita update ke teman-teman besok," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10) malam.

2. Sita Rp10 miliar

KPK mengamankan barang bukti awal berupa uang lebih dari Rp10 miliar dalam OTT tersebut. Uang itu diduga merupakan suap. "Kita mengamankan lebih dari Rp10 miliar karena masih dalam proses dihitung," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Senin (7/10).

3. Kasus PBJ

OTT yang dilakukan KPK di Kalsel diduga berkaitan dengan kasus dugaan OTT mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). "Biasa perkara PBJ," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (7/10). Ia menjelaskan hingga saat ini belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik OTT PBJ. "Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBJ," ucap Alex.

4. Uang diterima orang kepercayaan gubernur

Lembaga antirasuah mengungkapkan uang diduga suap terkait PBJ telah diterima orang kepercayaan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Namun, hingga kini belum diketahui status hukum dari Sahbirin Noor. "Patut diduga (Gubernur Kalsel). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," ungkap Alex

Pemberitaan dari Media Lokal yaitu Banjarmasinpost, memberitakan bahwa KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tersangka Usai OTT di Dinas PUPR, pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 17.16 WITA.



Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaporan media terkait Operasi Tangkap Tangan Gubernur Kalimantan Selatan lebih menekankan pada aspek hukum dan politik. Media nasional cenderung fokus pada implikasi politik, sementara media lokal lebih memperhatikan dampak sosial dan ekonomi. Analisis agenda setting menunjukkan bahwa media memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi publik mengenai OTT dan integritas politik. Variasi dalam framing berita juga memengaruhi pemahaman publik, di mana media nasional menganggap OTT sebagai masalah yang bersifat sistemik, sedangkan media lokal menyoroti dampak langsungnya.

B. Dampak Pelaporan Media terhadap Persepsi Publik tentang Integritas Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan media mengenai OTT Gubernur Kalimantan Selatan memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik tentang integritas politik. Media yang menyoroti OTT sebagai masalah sistemik cenderung membentuk persepsi publik bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi institusi politik. Sebaliknya, media yang fokus pada tindakan individu dapat membuat publik memandang OTT sebagai masalah yang terisolasi dan bukan bagian dari isu yang lebih luas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa framing berita oleh media dapat mempengaruhi bagaimana publik menilai integritas politik, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, survei opini publik yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap integritas politik cenderung menurun ketika media secara konsisten melaporkan kasus-kasus OTT. Responden yang terpapar berita

dengan framing negatif tentang institusi politik menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang terpapar berita dengan framing yang lebih netral atau positif. Temuan ini menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang integritas politik, dan bahwa pelaporan media dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin politik dan institusi pemerintahan.

1. Perkara Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2025

Komisi Pemberantasan OTT (KPK) melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana OTT yang melibatkan penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau perwakilannya di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024-2025. Kasus ini melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain Sahbirin Noor, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan beberapa pihak serta uang tunai sekitar Rp12 miliar dan mata uang asing senilai USD500.

Kronologi menunjukkan bahwa tersangka Y.E menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait dugaan OTT dalam proyek pembangunan lapangan sepak bola, gedung Samsat terpadu, dan kolam renang di Kalimantan Selatan. Proyek yang terlibat meliputi pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi senilai Rp9 miliar.

Dugaan rekayasa proyek oleh pejabat Dinas PUPR mencakup tindakan membocorkan harga perkiraan dan kualifikasi perusahaan dalam lelang proyek. Proses pemilihan e-katalog diduga direkayasa agar hanya perusahaan tertentu yang dapat mengajukan penawaran. Selain itu, penunjukan konsultan yang terhubung dengan pemberi suap dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelum penandatanganan kontrak juga menjadi sorotan.

Sebagai respons, Pemprov Kalimantan Selatan menghentikan sementara sejumlah proyek yang terlibat dalam kasus OTT, sementara proyek lain yang masih berjalan sesuai kontrak akan dilanjutkan dengan konsultasi untuk menghindari kesalahan. Sekretaris

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, berharap agar Pemprov Kalimantan Selatan segera menerima tanggapan dari KPK mengenai kelanjutan proyek yang terhenti.

KPK juga memeriksa tersangka S.W di Gedung Merah Putih. Sugeng diperiksa sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam rekayasa pengadaan dengan membocorkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan kualifikasi perusahaan yang diperlukan dalam lelang proyek pembangunan lapangan sepak bola, gedung Samsat terpadu, dan kolam renang di Kalimantan Selatan. Tersangka A.S juga menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, terkait dugaan OTT dalam pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2024 di Dinas PUPR yang bersumber dari APBD Kalsel tahun anggaran 2024. A.S kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di tempat yang sama.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek oleh KPK, Gubernur Kalimantan Selatan mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Permohonan tersebut berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka. KPK kemudian menahan enam tersangka selama 20 hari, mulai dari 7 Oktober 2024 hingga 26 Oktober 2024. Empat tersangka, yaitu SOL, YUL, AMD, dan FEB, ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas I Jakarta Timur, di Gedung KPK K4. Sementara itu, tersangka YUD dan AND ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas I Jakarta Timur, di Gedung KPK C1.

Fenomena spiral of silence juga teridentifikasi, di mana individu merasa enggan untuk menyampaikan pandangan yang berbeda karena takut terasing, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena spiral of silence berperan dalam memengaruhi ekspresi opini publik terkait OTT Gubernur Kalimantan Selatan. Media yang secara konsisten melaporkan pandangan tertentu, baik yang mendukung maupun menentang tindakan hukum terhadap gubernur, dapat menciptakan kesan bahwa pandangan tersebut adalah opini mayoritas. Akibatnya, individu yang memiliki pandangan berbeda cenderung ragu untuk mengungkapkan pendapat mereka karena takut akan isolasi atau pengucilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan media

tidak hanya memengaruhi persepsi publik, tetapi juga dapat membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan pendapat mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media memiliki peran yang sangat signifikan dalam komunikasi politik, khususnya dalam konteks Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui analisis framing dan agenda setting, dapat disimpulkan bahwa cara media menyajikan berita tidak hanya mempengaruhi persepsi publik tentang kasus OTT, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan pejabat publik. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa media nasional dan lokal memiliki pendekatan yang berbeda dalam membingkai berita terkait OTT. Media nasional cenderung menyoroti OTT sebagai masalah sistemik yang memerlukan reformasi, sedangkan media lokal lebih fokus pada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk narasi dan memprioritaskan isu-isu tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik.

Lebih jauh lagi, fenomena spiral of silence teridentifikasi dalam penelitian ini, di mana individu merasa tertekan untuk menyuarakan pandangan berbeda dari apa yang ditampilkan oleh media. Hal ini menciptakan iklim di mana sebagian masyarakat memilih untuk diam, sehingga membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam diskusi mengenai isu-isu politik. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan pentingnya pemberitaan yang objektif dan berimbang dalam media, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada media untuk lebih memperhatikan dampak dari framing berita yang mereka sajikan, serta pentingnya melibatkan berbagai perspektif dalam pelaporan untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu OTT dan integritas politik. Dengan demikian, media dapat berfungsi sebagai alat pengawas yang efektif dan mendukung proses demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Curran, J. (2000). Rethinking Media and Democracy. In *Media and Democracy: A Critical Approach* (pp. 1-20). New York: Routledge.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. New York: Harper & Row.
- Indraswari, R. (2017). *Challenges in Combating Corruption in Indonesia: A Study of Institutional and Political Factors*. Jakarta: Lembaga Penelitian.
- Lippmann, W. (1922). *Public Opinion*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. *Journal of Communication*, 57(1), 9-20.
- Syahrial Syarbaini, dkk. (2023). *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Retrieved from https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf
- Antikorupsi.org. (2018). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018*. Retrieved from https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf
- UIN Sunan Kalijaga. (2022). *Prosiding KPI 2022*. Retrieved from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57675/1/Prosiding%20KPI%202022%20FULL.pdf>
- Butterick, Keith. 2014. *Pengantar Public Relation*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- Indrawan, Rully Indrawan, dan Yaniawati, Poppy. 2017. *Metodologi Penelitian*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Suwanto. 2018. *Pengantar Public Relations Kontemporer*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Tempo. (2024, 7 Oktober). *Kronologi KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT Korupsi Proyek di Kalimantan Selatan*. Diakses

dari <https://nasional.tempco.co/read/1925995/kronologi-kpk-tangkap-6-orang-dalam-ott-korupsi-proyek-di-kalimantan-selatan>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). Perkara Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2025. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/perkara-penerimaan-hadiah-atau-janji-oleh-penyelenggara-negara-atau-yang-mewakilinya-di-provinsi-kalimantan-selatan-tahun-2024-2025>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan 2023. Retrieved from https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf

Politeknik Pratama. (n.d.). Journal of Health Policy and Systems. Retrieved from <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhps/article/download/1546/1529>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan 2022. Retrieved from https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf

Antikorupsi.org. (2018). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018. Retrieved from https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf

UIN Sunan Kalijaga. (2022). Prosiding KPI 2022. Retrieved from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57675/1/Prosiding%20KPI%202022%20FULL.pdf>

Universitas Ahmad Dahlan. (n.d.). DB Report Dialektika KomPol. Retrieved from https://eprints.uad.ac.id/61371/1/DB_report_Dialektika%20KomPol.pdf

CNN Indonesia. (2024, October 8). Fakta-fakta OTT KPK di Kalsel, tangkap 6 orang, sita Rp10 miliar. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241008060937-12-1152688/fakta-fakta-ott-kpk-di-kalsel-tangkap-6-orang-sita-rp10-miliar/amp>

Launa, & Tawaang, F. (2021). Pemberitaan kasus korupsi politik dalam konstruksi media. *Jurnal The Source*, 3(2), 76-. e-ISSN 2621-2242.

- Natalia, D. L. (2020). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 57-73. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>
- Andiyani, D. (2022, December 10). Pengertian Framing, Tujuan, dan Cara Penggunaannya. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/dinniandiyani6831/6396a85f4addee76762ac4f2/pengertian-framing-tujuan-dan-cara-penggunaannya>
- Yellow Brick Co. (n.d.). Local vs. National Journalism: Essential Differences. Retrieved from <https://www-yellowbrick-co.translate.goog/blog/journalism/local-vs-national-journalism-essential-differences? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=rq#:~:text=Local%20journalism%20focuses%20on%20news,spanning%20across%20the%20entire%20country.>